



KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: M.HH-01.KP.07.06 TAHUN 2012

TENTANG

PEJABAT KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
YANG WAJIB MELAPORKAN HARTA KEKAYAAN

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme menuju tata kelola yang baik di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah mewajibkan kepada para penyelenggara negara untuk melaporkan harta kekayaan;
 - b. bahwa selain Pejabat Struktural Eselon I, Pejabat Struktural Eselon II dan Pejabat Fungsional Auditor yang wajib melaporkan harta kekayaan sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.KP.07.06 Tahun 2011 tentang Pejabat di Kementerian Hukum dan HAM yang Wajib Melaporkan Harta Kekayaan, dipandang perlu melakukan perluasan wajib LHKPN bagi jabatan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM yang rawan korupsi;
 - c. bahwa guna keseragaman penyampaian LHKPN, dipandang perlu menetapkan Tata Cara Penyampaian LHKPN di Kementerian Hukum dan HAM;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, memandang perlu untuk melakukan perluasan wajib LHKPN bagi pejabat Kementerian Hukum dan HAM melalui Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang Pejabat Kementerian Hukum dan HAM Yang Wajib Melaporkan Harta Kekayaan.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
 2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001;
 3. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
 5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
 6. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 Tanggal 30 Desember 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia;
 7. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor SE/05/M-PAN/4/2006, tanggal 21 April 2006 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
 8. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.KP.07.06 Tahun 2011 tanggal 4 Mei 2011 tentang Pejabat di Kementerian Hukum dan HAM yang Wajib Melaporkan Harta Kekayaan.

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEJABAT KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM YANG WAJIB MELAPORKAN HARTA KEKAYAAN.

KESATU : Menetapkan Jabatan selain Jabatan Struktural Eselon I, Jabatan Struktural Eselon II dan Jabatan Fungsional Auditor di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM yang wajib menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) adalah sebagai berikut:

1. Pejabat Struktural Eselon III;
2. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
3. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
4. Bendahara dan/atau Pejabat Pengelola Keuangan;
5. Pejabat dan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa;
6. Pejabat/Kepala Unit Pelayanan Masyarakat;
7. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
8. Pemeriksa Paten, Merk dan Desain Industri.

KEDUA : Mewajibkan pemangku jabatan sebagaimana tersebut pada Diktum Kesatu dan tercantum dalam lampiran keputusan ini untuk menyampaikan LHKPN kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan menyampaikan fotokopi tanda terima LHKPN KPK kepada Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal selaku pengelola LHKPN dan Inspektorat Jenderal selaku pemantau dan pengendali LHKPN;

KETIGA : Mewajibkan pemangku jabatan sebagaimana tersebut pada Diktum Kesatu dan tercantum dalam lampiran keputusan ini untuk segera melaporkan LHKPN bagi yang belum melaporkan menggunakan Formulir LHKPN KPK-A.

KEEMPAT : Mewajibkan pemangku jabatan sebagaimana tersebut pada Diktum Kesatu dan tercantum dalam lampiran keputusan ini untuk melaporkan kembali LHKPN setiap mutasi, promosi dan pensiun, atau telah menduduki jabatan selama 2 (dua) tahun menggunakan Formulir LHKPN KPK-B.

KELIMA : Ketaatan penyampaian LHKPN sesuai dengan Diktum Kesatu dan Kedua akan dijadikan salah satu bahan pertimbangan dalam promosi/mutasi jabatan.

KELIMA : Terhadap ketidaktaatan penyampaian LHKPN sesuai dengan Diktum Kesatu dan Kedua akan dikenakan hukuman disiplin sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

KEENAM : Dengan berlakunya keputusan ini, Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.KP.07.06 Tahun 2011 tentang Pejabat di Kementerian Hukum dan HAM yang Wajib Melaporkan Harta Kekayaan masih berlaku.

KEPUTUSAN ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 22 Maret 2012

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi;
2. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

**PEJABAT KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
YANG WAJIB MELAPORKAN HARTA KEKAYAAN**

SEKRETARIAT JENDERAL

1. KEPALA BAGIAN PENGELOLAAN DAN PENDAYAGUNAAN TELEMATIKA PADA BIRO PERENCANAAN
2. KEPALA BAGIAN PROGRAM DAN ANGGARAN PADA BIRO PERENCANAAN
3. KEPALA BAGIAN EVALUASI DAN PELAPORAN PADA BIRO PERENCANAAN
4. KEPALA BAGIAN KELEMBAGAAN PADA BIRO PERENCANAAN
5. KEPALA BAGIAN TATALAKSANA PADA BIRO PERENCANAAN
6. KEPALA BAGIAN UMUM KEPEGAWAIAN PADA BIRO KEPEGAWAIAN
7. KEPALA BAGIAN PENGEMBANGAN KARIR PEGAWAI PADA BIRO KEPEGAWAIAN
8. KEPALA BAGIAN MUTASI PEGAWAI PADA BIRO KEPEGAWAIAN
9. KEPALA BAGIAN PEMBERHENTIAN, PENSUN DAN DISIPLIN PEGAWAI PADA BIRO KEPEGAWAIAN
10. KEPALA BAGIAN TATA USAHA KEPEGAWAIAN PADA BIRO KEPEGAWAIAN
11. KEPALA BAGIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PADA BIRO KEUANGAN
12. KEPALA BAGIAN PERBENDAHARAAN DAN TATA USAHA KEUANGAN PADA BIRO KEUANGAN
13. KEPALA BAGIAN PENGUJIAN DOKUMEN DAN PENERBITAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR PADA BIRO KEUANGAN
14. KEPALA BAGIAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN PADA BIRO KEUANGAN
15. KEPALA BAGIAN ANALISA KEBUTUHAN PADA BIRO PERLENGKAPAN
16. KEPALA BAGIAN PENGADAAN PADA BIRO PERLENGKAPAN
17. KEPALA BAGIAN PENYIMPANAN DAN PENYALURAN PADA BIRO PERLENGKAPAN
18. KEPALA BAGIAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA PADA BIRO PERLENGKAPAN
19. KEPALA BAGIAN PENGHAPUSAN PADA BIRO PERLENGKAPAN
20. KEPALA BAGIAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN PADA BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN KERJA SAMA LUAR NEGERI
21. KEPALA BAGIAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PADA BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN KERJA SAMA LUAR NEGERI
22. KEPALA BAGIAN KERJASAMA LUAR NEGERI PADA BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN KERJA SAMA LUAR NEGERI
23. KEPALA BAGIAN FASILITASI DAN PENGADUAN MASALAH HUKUM PADA BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN KERJA SAMA LUAR NEGERI
24. KEPALA BAGIAN TATA USAHA KEMENTERIAN PADA BIRO UMUM
25. KEPALA BAGIAN TATA USAHA PIMPINAN PADA BIRO UMUM
26. KEPALA BAGIAN BINA SIKAP MENTAL PADA BIRO UMUM
27. KEPALA BAGIAN RUMAH TANGGA PADA BIRO UMUM
28. KEPALA BAGIAN PENGAMANAN PADA BIRO UMUM
29. KEPALA BAGIAN UMUM PADA PUSAT PENKKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN
30. KEPALA BIDANG PENYUSUNAN PROGRAM DAN LAPORAN PADA PUSAT PENKKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN
31. KEPALA BIDANG PENKKAJIAN DAN PENGEMBANGAN PADA PUSAT PENKKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN

INSPEKTORAT JENDERAL

32. KEPALA BAGIAN PROGRAM DAN PELAPORAN PADA SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL
33. KEPALA BAGIAN LAPORAN HASIL PENGAWASAN I PADA SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL
34. KEPALA BAGIAN LAPORAN HASIL PENGAWASAN II PADA SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL
35. KEPALA BAGIAN UMUM PADA SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL
36. KEPALA BAGIAN KEPEGAWAIAN PADA SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL

DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI

37. KEPALA BAGIAN PROGRAM DAN PELAPORAN PADA SEKRETARIAT DITJEN IMIGRASI
38. KEPALA BAGIAN KEPEGAWAIAN PADA SEKRETARIAT DITJEN IMIGRASI
39. KEPALA BAGIAN KEUANGAN KEPALA BAGIAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA DAN RUMAH TANGGA PADA SEKRETARIAT DITJEN IMIGRASI
40. KEPALA BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN TATA USAHA PADA SEKRETARIAT DITJEN IMIGRASI
41. KEPALA SUBDIT SURAT PERJALANAN PADA DIREKTORAT DOKUMEN PERJALANAN, VISA DAN FASILITAS KEIMIGRASIAN
42. KEPALA SUBDIT SURAT PERJALANAN KHUSUS TENAGA KERJA INDONESIA PADA DIREKTORAT DOKUMEN PERJALANAN, VISA DAN FASILITAS KEIMIGRASIAN
43. KEPALA SUBDIT VISA PADA DIREKTORAT DOKUMEN PERJALANAN, VISA DAN FASILITAS KEIMIGRASIAN
44. KEPALA SUBDIT IZIN MASUK, BERTOLAK DAN TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI PADA DIREKTORAT DOKUMEN PERJALANAN, VISA DAN FASILITAS KEIMIGRASIAN
45. KEPALA SUBDIT FASILITAS KEIMIGRASIAN PADA DIREKTORAT DOKUMEN PERJALANAN, VISA DAN FASILITAS KEIMIGRASIAN
46. KEPALA SUBDIT IJIN TINGGAL PADA DIREKTORAT IJIN TINGGAL DAN STATUS KEIMIGRASIAN
47. KEPALA SUBDIT ALIH STATUS KEIMIGRASIAN PADA DIREKTORAT IJIN TINGGAL DAN STATUS KEIMIGRASIAN
48. KEPALA SUBDIT PENELAAHAN STATUS KEIMIGRASIAN DAN KEWARGANEGARAAN PADA DIREKTORAT IJIN TINGGAL DAN STATUS KEIMIGRASIAN
49. KEPALA SUBDIT OPERASI INTELIJEN KEIMIGRASIAN PADA DIREKTORAT INTELIJEN KEIMIGRASIAN
50. KEPALA SUBDIT PRODUKSI INTELIJEN KEIMIGRASIAN PADA DIREKTORAT INTELIJEN KEIMIGRASIAN
51. KEPALA SUBDIT KERJASAMA INTELIJEN KEIMIGRASIAN PADA DIREKTORAT INTELIJEN KEIMIGRASIAN
52. KEPALA SUBDIT PENGAMANAN KEIMIGRASIAN PADA DIREKTORAT INTELIJEN KEIMIGRASIAN
53. KEPALA SUBDIT PENYIDIKAN KEIMIGRASIAN PADA DIREKTORAT PENYIDIKAN DAN PENINDAKAN KEIMIGRASIAN
54. KEPALA SUBDIT PENINDAKAN KEIMIGRASIAN DIREKTORAT PENYIDIKAN DAN PENINDAKAN KEIMIGRASIAN
55. KEPALA SUBDIT PENCEGAHAN DAN PENANGKALAN DIREKTORAT PENYIDIKAN DAN PENINDAKAN KEIMIGRASIAN
56. KEPALA SUBDIT DETENSI IMIGRASI DAN DEPORTASI DIREKTORAT PENYIDIKAN DAN PENINDAKAN KEIMIGRASIAN
57. KEPALA SUBDIT KERJA SAMA PERBATASAN PADA DIREKTORAT LINTAS BATAS DAN KERJA SAMA LUAR NEGERI KEIMIGRASIAN
58. KEPALA SUBDIT KERJASAMA ORGANISASI INTERNASIONAL DIREKTORAT LINTAS BATAS DAN KERJA SAMA LUAR NEGERI KEIMIGRASIAN
59. KEPALA SUBDIT KERJASAMA ANTAR NEGARA DIREKTORAT LINTAS BATAS DAN KERJA SAMA LUAR NEGERI KEIMIGRASIAN
60. KEPALA SUBDIT KERJA SAMA PERWAKILAN DIREKTORAT LINTAS BATAS DAN KERJA SAMA LUAR NEGERI KEIMIGRASIAN
61. KEPALA SUBDIT PERENCANAAN DAN PENGAMANAN PADA DIREKTORAT SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI KEIMIGRASIAN
62. KEPALA SUBDIT PELAPORAN DAN PEMELIHARAAN PADA DIREKTORAT SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI KEIMIGRASIAN
63. KEPALA SUBDIT KERJA SAMA TEKNOLOGI INFORMASI DAN PENYEBARAN INFORMASI KEIMIGRASIAN PADA DIREKTORAT SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI KEIMIGRASIAN
64. KEPALA SUBDIT DOKUMEN KEIMIGRASIAN DAN KARTU ELEKTRONIK PADA DIREKTORAT SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI KEIMIGRASIAN

DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN

65. KEPALA BAGIAN PROGRAM DAN PELAPORAN PADA SEKRETARIAT DITJEN PEMASYARAKATAN
66. KEPALA BAGIAN KEPEGAWAIAN PADA SEKRETARIAT DITJEN PEMASYARAKATAN
67. KEPALA BAGIAN KEUANGAN PADA SEKRETARIAT DITJEN PEMASYARAKATAN

68. KEPALA BAGIAN PERLENGKAPAN PADA SEKRETARIAT DITJEN PEMASYARAKATAN
69. KEPALA BAGIAN UMUM PADA SEKRETARIAT DITJEN PEMASYARAKATAN
70. KEPALA SUBDIT REGISTRASI DAN IDENTIFIKASI PADA DIREKTORAT BINA PENGELOLAAN BASAN DAN BARAN
71. KEPALA SUBDIT MUTASI DAN PENGHAPUSAN PADA DIREKTORAT BINA PENGELOLAAN BASAN DAN BARAN
72. KEPALA SUBDIT PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN PADA DIREKTORAT BINA PENGELOLAAN BASAN DAN BARAN
73. KEPALA SUBDIT PENGAWASAN MAKANAN PADA DIREKTORAT BINA KESEHATAN DAN PERAWATAN NARAPIDANA DAN TAHANAN
74. KEPALA SUBDIT PENGAWASAN KESEHATAN PADA DIREKTORAT BINA KESEHATAN DAN PERAWATAN NARAPIDANA DAN TAHANAN
75. KEPALA SUBDIT PENYAKIT MENULAR DAN KETERGANTUNGAN NAPZA PADA DIREKTORAT BINA KESEHATAN DAN PERAWATAN NARAPIDANA DAN TAHANAN
76. KEPALA SUBDIT PERLINDUNGAN KELOMPOK RENTAN DAN RESIKO TINGGI PADA DIREKTORAT BINA KESEHATAN DAN PERAWATAN NARAPIDANA DAN TAHANAN
77. KEPALA SUBDIT REGISTRASI ANAK DAN KLIEN DEWASA PADA DIREKTORAT BIMBINGAN KEMASYARAKATAN DAN PENGENTASAN ANAK
78. KEPALA SUBDIT PERLINDUNGAN DAN PENGENTASAN ANAK PADA DIREKTORAT BINA KESEHATAN DAN PERAWATAN NARAPIDANA DAN TAHANAN
79. KEPALA SUBDIT PENDIDIKAN PADA DIREKTORAT BINA KESEHATAN DAN PERAWATAN NARAPIDANA DAN TAHANAN
80. KEPALA SUBDIT BIMBINGAN DAN PENGAWASAN KLIEN DEWASA PADA DIREKTORAT BINA KESEHATAN DAN PERAWATAN NARAPIDANA DAN TAHANAN
81. KEPALA SUBDIT PENELITIAN KEMASYARAKATAN PADA DIREKTORAT BINA KESEHATAN DAN PERAWATAN NARAPIDANA DAN TAHANAN
82. KEPALA SUBDIT REGISTRASI DAN KLASIFIKASI PADA DIREKTORAT BINA NARAPIDANA DAN PELAYANAN TAHANAN
83. KEPALA SUBDIT PELAYANAN TAHANAN DAN BANTUAN HUKUM PADA DIREKTORAT BINA NARAPIDANA DAN PELAYANAN TAHANAN
84. KEPALA SUBDIT INTEGRASI DAN TIM PENGAMAT PEMASYARAKATAN PADA DIREKTORAT BINA NARAPIDANA DAN PELAYANAN TAHANAN
85. KEPALA SUBDIT BIMBINGAN KEMANDIRIAN PADA DIREKTORAT BINA NARAPIDANA DAN PELAYANAN TAHANAN
86. KEPALA SUBDIT BIMBINGAN KEPRIBADIAN PADA DIREKTORAT BINA NARAPIDANA DAN PELAYANAN TAHANAN
87. KEPALA SUBDIT PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN PADA DIREKTORAT BINA KEAMANAN DAN KETERTIBAN
88. KEPALA SUBDIT STANDARDISASI DAN EVALUASI PADA DIREKTORAT BINA KEAMANAN DAN KETERTIBAN
89. KEPALA SUBDIT KODE ETIK PROFESI PADA DIREKTORAT BINA KEAMANAN DAN KETERTIBAN
90. KEPALA SUBDIT PELAYANAN PENGADUAN PADA DIREKTORAT BINA KEAMANAN DAN KETERTIBAN
91. PADA DIREKTORAT INFORMASI DAN KOMUNIKASI
92. KEPALA SUBDIT DATA DAN INFORMASI PADA DIREKTORAT INFORMASI DAN KOMUNIKASI
93. KEPALA SUBDIT KOMUNIKASI PADA DIREKTORAT INFORMASI DAN KOMUNIKASI
94. KEPALA SUBDIT KERJA SAMA PADA DIREKTORAT INFORMASI DAN KOMUNIKASI

DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

95. KEPALA BAGIAN PROGRAM DAN PELAPORAN PADA SEKRETARIAT DITJEN AHU
96. KEPALA BAGIAN KEPEGAWAIAN PADA DIREKTORAT INFORMASI DAN KOMUNIKASI
97. KEPALA BAGIAN KEUANGAN PADA DIREKTORAT INFORMASI DAN KOMUNIKASI
98. KEPALA BAGIAN UMUM PADA DIREKTORAT INFORMASI DAN KOMUNIKASI
99. KEPALA BAGIAN TATA USAHA PADA DIREKTORAT INFORMASI DAN KOMUNIKASI
100. KEPALA SUBDIT HUKUM PERDATA UMUM PADA DIREKTORAT PERDATA
101. KEPALA SUBDIT BADAN HUKUM PADA DIREKTORAT INFORMASI DAN KOMUNIKASI
102. KEPALA SUBDIT PENDAFTARAN FIDUSIA PADA DIREKTORAT INFORMASI DAN KOMUNIKASI
103. KEPALA SUBDIT HARTA PENINGGALAN PADA DIREKTORAT INFORMASI DAN KOMUNIKASI
104. KEPALA SUBDIT NOTARIAT PADA DIREKTORAT INFORMASI DAN KOMUNIKASI
105. KEPALA SUBDIT PELAYANAN HUKUM PIDANA DAN GRASI PADA DIREKTORAT PIDANA

106. KEPALA SUBDIT PEMANTAUAN DAN EVALUASI HUKUM PIDANA PADA DIREKTORAT PIDANA
107. KEPALA SUBDIT PENYIDIK PNS PADA DIREKTORAT PIDANA
108. KEPALA SUBDIT HUKUM TATA NEGARA PADA DIREKTORAT TATA NEGARA
109. KEPALA SUBDIT PEWARGANEGARAAN PADA DIREKTORAT TATA NEGARA
110. KEPALA SUBDIT KEWARGANEGARAAN PADA DIREKTORAT TATA NEGARA
111. KEPALA SUBDIT OTORITAS PUSAT DAN HUKUM HUMANITER PADA DIREKTORAT HUKUM INTERNASIONAL DAN OTORITAS PUSAT
112. KEPALA SUBDIT HUKUM EKONOMI, PERDATA DAN LEMBAGA INTERNASIONAL PADA DIREKTORAT HUKUM INTERNASIONAL DAN OTORITAS PUSAT
113. KEPALA SUBDIT HUKUM LAUT, UDARA DAN LINGKUNGAN PADA DIREKTORAT HUKUM INTERNASIONAL DAN OTORITAS PUSAT
114. KEPALA SUBDIT PERUMUSAN DAN IDENTIFIKASI PADA DIREKTORAT DAKTILOSKOPI
115. KEPALA SUBDIT DATA DAN INFORMASI PADA DIREKTORAT DAKTILOSKOPI
116. KEPALA SUBDIT DOKUMENTASI DAN ARSIP PADA DIREKTORAT DAKTILOSKOPI

DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

117. KEPALA BAGIAN PROGRAM DAN PELAPORAN PADA SEKRETARIAT DITJEN HKI
118. KEPALA BAGIAN KEPEGAWAIAN PADA SEKRETARIAT DITJEN HKI
119. KEPALA BAGIAN KEUANGAN PADA SEKRETARIAT DITJEN HKI
120. KEPALA BAGIAN UMUM PADA SEKRETARIAT DITJEN HKI
121. KEPALA BAGIAN TATA USAHA DAN HUBUNGAN MASYARAKAT PADA SEKRETARIAT DITJEN HKI
122. KEPALA SUBDIT PERMOHONAN DAN PUBLIKASI PADA DIREKTORAT HAK CIPTA, DESAIN INDUSTRI, DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU DAN RHS DAGANG
123. KEPALA SUBDIT KLASIFIKASI DAN PEMERIKSAAN PADA DIREKTORAT HAK CIPTA, DESAIN INDUSTRI, DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU DAN RHS DAGANG
124. KEPALA SUBDIT SERTIFIKASI, MUTASI DAN LISENSI PADA DIREKTORAT HAK CIPTA, DESAIN INDUSTRI, DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU DAN RHS DAGANG
125. KEPALA SUBDIT PELAYANAN HUKUM PADA DIREKTORAT HAK CIPTA, DESAIN INDUSTRI, DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU DAN RHS DAGANG
126. KEPALA SUBDIT PERMOHONAN DAN PUBLIKASI PADA DIREKTORAT PATEN
127. KEPALA SUBDIT KLASIFIKASI DAN PENELUSURAN PADA DIREKTORAT PATEN
128. KEPALA SUBDIT PEMERIKSAAN PADA DIREKTORAT PATEN
129. KEPALA SUBDIT SERTIFIKASI, PEMELIHARAAN, MUTASI DAN LISENSI PADA DIREKTORAT PATEN
130. KEPALA SUBDIT PELAYANAN HUKUM PADA DIREKTORAT PATEN
131. KEPALA SUBDIT PERMOHONAN DAN PUBLIKASI PADA DIREKTORAT MEREK
132. KEPALA SUBDIT PEMERIKSAAN PADA DIREKTORAT MEREK
133. KEPALA SUBDIT INDIKASI GEOGRAFIS PADA DIREKTORAT MEREK
134. KEPALA SUBDIT SERTIFIKASI, PERPANJANGAN, MUTASI DAN LISENSI PADA DIREKTORAT MEREK
135. KEPALA SUBDIT PELAYANAN HUKUM PADA DIREKTORAT MEREK
136. KEPALA SUBDIT PROMOSI PADA DIREKTORAT KERJA SAMA DAN PROMOSI
137. KEPALA SUBDIT KERJA SAMA LUAR NEGERI PADA DIREKTORAT KERJA SAMA DAN PROMOSI
138. KEPALA SUBDIT KERJA SAMA DALAM NEGERI PADA DIREKTORAT KERJA SAMA DAN PROMOSI
139. KEPALA SUBDIT PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PADA DIREKTUR TEKNOLOGI INFORMASI
140. KEPALA SUBDIT PENDUKUNG SISTEM PADA DIREKTUR TEKNOLOGI INFORMASI
141. KEPALA SUBDIT PENGEMBANGAN PROSES PADA DIREKTUR TEKNOLOGI INFORMASI
142. KEPALA SUBDIT DOKUMENTASI DAN PERPUSTAKAAN PADA DIREKTUR TEKNOLOGI INFORMASI
143. KEPALA SUBDIT PENGADUAN PADA DIREKTORAT PENYIDIKAN
144. KEPALA SUBDIT PENINDAKAN DAN PEMANTAUAN PADA DIREKTORAT PENYIDIKAN

DIREKTORAT JENDERAL HAK ASASI MANUSIA

145. KEPALA BAGIAN PROGRAM DAN PELAPORAN PADA SEKRETARIAT DITJEN HAM
146. KEPALA BAGIAN KEPEGAWAIAN PADA SEKRETARIAT DITJEN HAM
147. KEPALA BAGIAN KEUANGAN PADA SEKRETARIAT DITJEN HAM
148. KEPALA BAGIAN UMUM PADA SEKRETARIAT DITJEN HAM
149. KEPALA BAGIAN TATA USAHA PADA SEKRETARIAT DITJEN HAM

150. KEPALA SUBDIT PELAYANAN KOMUNIKASI MASYARAKAT WIL I PADA DIREKTORAT PELAYANAN KOMUNIKASI MASYARAKAT
151. KEPALA SUBDIT PELAYANAN KOMUNIKASI MASYARAKAT WIL II PADA DIREKTORAT PELAYANAN KOMUNIKASI MASYARAKAT
152. KEPALA SUBDIT PELAYANAN KOMUNIKASI MASYARAKAT WIL III PADA DIREKTORAT PELAYANAN KOMUNIKASI MASYARAKAT
153. KEPALA SUBDIT PELAYANAN KOMUNIKASI KHUSUS PADA DIREKTORAT PELAYANAN KOMUNIKASI MASYARAKAT
154. KEPALA SUBDIT KERJA SAMA LUAR NEGERI PADA DIREKTORAT KERJA SAMA HAM
155. KEPALA SUBDIT KERJA SAMA DALAM NEGERI PADA DIREKTORAT KERJA SAMA HAM
156. KEPALA SUBDIT LEGISLASI DAN HARMONISASI HAM PADA DIREKTORAT KERJA SAMA HAM
157. KEPALA SUBDIT INSTRUMEN HAM PADA DIREKTORAT KERJA SAMA HAM
158. KEPALA SUBDIT PROGRAM DISEMINASI PADA DIREKTORAT DISEMINASI HAM
159. KEPALA SUBDIT PEMBUDAYAAN KESADARAN HAM PADA DIREKTORAT DISEMINASI HAM
160. KEPALA SUBDIT PENYULUHAN HAM PADA DIREKTORAT DISEMINASI HAM
161. KEPALA SUBDIT EVALUASI DAN PENGEMBANGAN DISEMINASI HAM PADA DIREKTORAT DISEMINASI HAM
162. KEPALA SUBDIT PROGRAM DAN BIMBINGAN TEKNIS HAM PADA DIREKTORAT PENGUATAN HAM
163. KEPALA SUBDIT PENGUATAN HAM WILAYAH PADA DIREKTORAT PENGUATAN HAM
164. KEPALA SUBDIT PENGUATAN HAM WILAYAH II PADA DIREKTORAT PENGUATAN HAM
165. KEPALA SUBDIT PENGUATAN HAM WILAYAH III PADA DIREKTORAT PENGUATAN HAM
166. KEPALA SUBDIT DATA DAN INFORMASI HAM PADA DIREKTORAT INFORMASI HAM
167. KEPALA SUBDIT SISTEM DAN JARINGAN HAM PADA DIREKTORAT INFORMASI HAM
168. KEPALA SUBDIT PUBLIKASI DAN DOKUMENTASI HAM PADA DIREKTORAT INFORMASI HAM
169. KEPALA SUBDIT EVALUASI DAN PELAPORAN HAM PADA DIREKTORAT INFORMASI HAM

DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

170. KEPALA BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM DAN PELAPORAN PADA SEKRETARIAT DITJEN PP
171. KEPALA BAGIAN KEPEGAWAIAN PADA SEKRETARIAT DITJEN PP
172. KEPALA BAGIAN KEUANGAN PADA SEKRETARIAT DITJEN PP
173. KEPALA BAGIAN PERLENGKAPAN PADA SEKRETARIAT DITJEN PP
174. KEPALA BAGIAN UMUM PADA SEKRETARIAT DITJEN PP
175. KEPALA SUBDIT PERENCANAAN DAN PERANCANGAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG PADA DIREKTORAT PERANCANGAN PP
176. KEPALA SUBDIT PERENCANAAN DAN PERANCANGAN RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH, PERATURAN PRESIDEN DAN PERATURAN MENTERI PADA DIREKTORAT PERANCANGAN PP
177. KEPALA SUBDIT PEMBAHASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG PADA DIREKTORAT PERANCANGAN PP
178. KEPALA SUBDIT PEMBINAAN PERANCANG PP PADA DIREKTORAT PERANCANGAN PP
179. KEPALA SUBDIT DOKUMENTASI DAN PERPUSTAKAAN PADA DIREKTORAT PERANCANGAN PP
180. PADA DIREKTORAT HARMONISASI PP
181. KEPALA SUBDIT HARMONISASI BID POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN PADA DIREKTORAT HARMONISASI PP
182. KEPALA SUBDIT HARMONISASI BID KEUANGAN DAN PERBANKAN PADA DIREKTORAT HARMONISASI PP
183. KEPALA SUBDIT HARMONISASI BID INDUSTRI PERDAGANGAN RISET DAN TEKNOLOGI PADA DIREKTORAT HARMONISASI PP
184. KEPALA SUBDIT HARMONISASI BID KESEJAHTERAAN RAKYAT PADA DIREKTORAT HARMONISASI PP
185. KEPALA SUBDIT PUBLIKASI PADA DIREKTORAT PENGUNDANGAN, PUBLIKASI, DAN KERJASAMA PP
186. KEPALA SUBDIT KERJA SAMA PADA DIREKTORAT PENGUNDANGAN, PUBLIKASI, DAN KERJASAMA PP
187. KEPALA SUBDIT PENGUNDANGAN PP PADA DIREKTORAT PENGUNDANGAN, PUBLIKASI, DAN KERJASAMA PP PADA DIREKTORAT PENGUNDANGAN, PUBLIKASI, DAN KERJASAMA PP
188. KEPALA SUBDIT SISTEM INFORMASI PERATURAN PP PADA DIREKTORAT PENGUNDANGAN, PUBLIKASI, DAN KERJASAMA PP PADA DIREKTORAT LITIGASI PERUNDANG-UNDANGAN
189. KEPALA SUBDIT PENYIAPAN PENDAMPINGAN PERSIDANGAN I PADA DIREKTORAT LITIGASI PERUNDANG-UNDANGAN PADA DIREKTORAT LITIGASI PERUNDANG-UNDANGAN

190. KEPALA SUBDIT FASILITASI BAHAN DAN ANALISA PADA DIREKTORAT LITIGASI PERUNDANG-UNDANGAN
191. KEPALA SUBDIT PENYIAPAN PENDAMPINGAN PERSIDANGAN II PADA DIREKTORAT LITIGASI PERUNDANG-UNDANGAN
192. KEPALA SUBDIT PEMETAAN DAN PUBLIKASI PERATURAN DAERAH PADA DIREKTORAT FASILITASI PERANCANGAN PERDA PADA DIREKTORAT FASILITASI PERANCANGAN PERDA
193. KEPALA SUBDIT FASILITASI PERANCANGAN PERATURAN DAERAH WILAYAH I PADA DIREKTORAT FASILITASI PERANCANGAN PERDA
194. KEPALA SUBDIT FASILITASI PERANCANGAN PERATURAN DAERAH WILAYAH II PADA DIREKTORAT FASILITASI PERANCANGAN PERDA
195. KEPALA SUBDIT FASILITASI PERANCANGAN PERATURAN DAERAH WILAYAH III PADA DIREKTORAT FASILITASI PERANCANGAN PERDA

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAM

196. KEPALA BAGIAN PROGRAM DAN KERJA SAMA PADA SEKRETARIAT BPSDM HUKUM DAN HAM
197. KEPALA BAGIAN KEPEGAWAIAN PADA SEKRETARIAT BPSDM HUKUM DAN HAM
198. KEPALA BAGIAN KEUANGAN PADA SEKRETARIAT BPSDM HUKUM DAN HAM
199. KEPALA BAGIAN UMUM PADA SEKRETARIAT BPSDM HUKUM DAN HAM
200. PADA PUSAT PENGEMBANGAN KEPEMIMPINAN DAN MANAJEMEN
201. KEPALA BIDANG PROGRAM PADA PUSAT PENGEMBANGAN KEPEMIMPINAN DAN MANAJEMEN
202. KEPALA BIDANG PENYELENGGARAAN PADA PUSAT PENGEMBANGAN KEPEMIMPINAN DAN MANAJEMEN
203. KEPALA BIDANG EVALUASI DAN PELAPORAN PADA PUSAT PENGEMBANGAN KEPEMIMPINAN DAN MANAJEMEN
204. PADA PUSAT PENGEMBANGAN TEKNIS
205. KEPALA BIDANG PROGRAM PADA PUSAT PENGEMBANGAN TEKNIS
206. KEPALA BIDANG PENYELENGGARAAN PADA PUSAT PENGEMBANGAN TEKNIS
207. KEPALA BIDANG EVALUASI DAN PELAPORAN PADA PUSAT PENGEMBANGAN TEKNIS
208. KEPALA BIDANG PROGRAM PADA PUSAT PENGEMBANGAN FUNGSIONAL DAN HAM
209. KEPALA BIDANG PENYELENGGARAAN PADA PUSAT PENGEMBANGAN FUNGSIONAL DAN HAM
210. KEPALA BIDANG EVALUASI DAN PELAPORAN PADA PUSAT PENGEMBANGAN FUNGSIONAL DAN HAM

BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

211. KEPALA BAGIAN PROGRAM DAN PELAPORAN PADA SEKRETARIAT BPHN
212. KEPALA BAGIAN KEPEGAWAIAN PADA SEKRETARIAT BPHN
213. KEPALA BAGIAN KEUANGAN PADA SEKRETARIAT BPHN
214. KEPALA BAGIAN UMUM PADA SEKRETARIAT BPHN
215. KEPALA BAGIAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT BPHN
216. KEPALA BIDANG PENELITIAN KELEMBAGAAN DAN PENEGAKAN HUKUM PADA PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM HUKUM NASIONAL
217. KEPALA BIDANG PENELITIAN SUBSTANSI HUKUM PADA PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM HUKUM NASIONAL
218. KEPALA BIDANG PENELITIAN BUDAYA HUKUM DAN MASYARAKAT PADA PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM HUKUM NASIONAL
219. KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN HUKUM DAN FASILITASI PENELITIAN PADA PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM HUKUM NASIONAL
220. KEPALA BIDANG RENCANA DAN FASILITASI PEMBANGUNAN HUKUM PADA PUSAT PERENCANAAN PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL
221. KEPALA BIDANG PERENCANAAN LEGISLASI PADA PUSAT PERENCANAAN PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL
222. KEPALA BIDANG PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK PP PADA PUSAT PERENCANAAN PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL
223. KEPALA BIDANG OTOMASI DOKUMENTASI HUKUM PADA PUSAT DOKUMENTASI DAN JARINGAN INFORMASI HUKUM NASIONAL
224. KEPALA BIDANG PERPUSTAKAAN HUKUM PADA PUSAT DOKUMENTASI DAN JARINGAN INFORMASI HUKUM NASIONAL
225. KEPALA BIDANG JARINGAN INFORMASI HUKUM PADA PUSAT DOKUMENTASI DAN JARINGAN INFORMASI HUKUM NASIONAL
226. KEPALA BIDANG DESA SADAR HUKUM PADA PUSAT PENYULUHAN HUKUM

227. KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN PENYULUHAN HUKUM PADA PUSAT PENYULUHAN HUKUM

228. KEPALA BIDANG PEMBUDAYAAN HUKUM PADA PUSAT PENYULUHAN HUKUM

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HAK ASASI MANUSIA

229. KEPALA BAGIAN PROGRAM DAN PELAPORAN PADA SEKRETARIAT BALITBANG HAM

230. KEPALA BAGIAN KEPEGAWAIAN PADA SEKRETARIAT BALITBANG HAM

231. KEPALA BAGIAN KEUANGAN PADA SEKRETARIAT BALITBANG HAM

232. KEPALA BAGIAN UMUM PADA SEKRETARIAT BALITBANG HAM

233. KEPALA BAGIAN HUMAS DAN INFORMASI PADA SEKRETARIAT BALITBANG HAM

234. KEPALA BIDANG PENELITIAN HAK-HAK SIPIL DAN POLITIK PADA PUSLIT DAN PENGEMBANGAN HAK-HAK SIPIL DAN POLITIK

235. KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN HAK-HAK SIPIL DAN POLITIK PADA PUSLIT DAN PENGEMBANGAN HAK-HAK SIPIL DAN POLITIK

236. KEPALA BIDANG EVALUASI HAK-HAK SIPIL DAN POLITIK PADA PUSLIT DAN PENGEMBANGAN HAK-HAK SIPIL DAN POLITIK

237. KEPALA BIDANG PENELITIAN HAK-HAK EKONOMI SOSIAL DAN BUDAYA PADA PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HAK-HAK EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA

238. KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN HAK-HAK EKOSOSBUD PADA PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HAK-HAK EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA

239. KEPALA BIDANG EVALUASI HAK-HAK EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA PADA PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HAK-HAK EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA

240. KEPALA BIDANG PENELITIAN TRANSFORMASI KONFLIK PADA PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TRANSFORMASI KONFLIK

241. KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN TRANSFORMASI KONFLIK PADA PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TRANSFORMASI KONFLIK

242. KEPALA BIDANG EVALUASI TRANSFORMASI KONFLIK PADA PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TRANSFORMASI KONFLIK

243. KEPALA BIDANG PENELITIAN HAK-HAK KELOMPOK KHUSUS PADA PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HAK-HAK KELOMPOK KHUSUS

244. KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN HAK-HAK KELOMPOK KHUSUS PADA PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HAK-HAK KELOMPOK KHUSUS

245. KEPALA BIDANG EVALUASI HAK-HAK KELOMPOK KHUSUS PADA PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HAK-HAK KELOMPOK KHUSUS

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM

246. KEPALA BAGIAN UMUM PADA DIVISI ADMINISTRASI SELURUH INDONESIA

247. KEPALA BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM DAN LAPORAN PADA DIVISI ADMINISTRASI SELURUH INDONESIA

248. KEPALA BIDANG KEAMANAN DAN PEMBINAAN PADA DIVISI PEMASYARAKATAN SELURUH INDONESIA

249. KEPALA BIDANG REG PERAWATAN DAN BINA KHUSUS NARKOTIKA PADA DIVISI PEMASYARAKATAN SELURUH INDONESIA

250. KEPALA BIDANG LALU LINTAS IZIN TINGGAL DAN STATUS KEIMIGRASIAN PADA DIVISI KEIMIGRASIAN SELURUH INDONESIA

251. KEPALA BIDANG INTELIJEN PENINDAKAN DAN SISTEM INFORMASI KEIMIGRASIAN PADA DIVISI KEIMIGRASIAN SELURUH INDONESIA

252. KEPALA BIDANG PELAYANAN HUKUM PADA DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM SELURUH INDONESIA

253. KEPALA BIDANG HUKUM PADA DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM SELURUH INDONESIA

254. KEPALA BIDANG HAM PADA DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM SELURUH INDONESIA

UNIT PELAKSANA TEKNIS

255. KEPALA KPLP PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS I SELURUH INDONESIA

256. KEPALA BAGIAN TATA USAHA PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS I SELURUH INDONESIA

257. KEPALA BIDANG PEMBINAAN NAPI PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS I SELURUH INDONESIA

258. KEPALA BIDANG KEGIATAN KERJA PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS I SELURUH INDONESIA

259. KEPALA BIDANG ADM. KAMTIB PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS I SELURUH INDONESIA
260. KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIA SELURUH INDONESIA
261. KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIA NARKOTIKA SELURUH INDONESIA
262. KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIB SELURUH INDONESIA
263. KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIB TERBUKA SELURUH INDONESIA
264. KEPALA RUMAH TAHANAN KLAS I SELURUH INDONESIA
265. KEPALA RUMAH TAHANAN KLAS IIA SELURUH INDONESIA
266. KEPALA RUMAH TAHANAN KLAS IIB SELURUH INDONESIA
267. KEPALA BALAI PEMASYARAKATAN KLAS I SELURUH INDONESIA
268. KEPALA BALAI PEMASYARAKATAN KLAS II SELURUH INDONESIA
269. KEPALA RUMAH PENYIMPANAN BARANG SITAAN NEGARA KLAS I SELURUH INDONESIA
270. KEPALA RUMAH PENYIMPANAN BARANG SITAAN NEGARA KLAS II SELURUH INDONESIA
271. KEPALA CABANG RUMAH TAHANAN SELURUH INDONESIA
272. KETUA BALAI HARTA PENINGGALAN SELURUH INDONESIA
273. SEKRETARIS BALAI HARTA PENINGGALAN SELURUH INDONESIA
274. ANGGOTA TEHNIS HUKUM BALAI HARTA PENINGGALAN SELURUH INDONESIA
275. KEPALA BAGIAN TATA USAHA PADA KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS SELURUH INDONESIA
276. KEPALA BIDANG FORSAKIM PADA KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS SELURUH INDONESIA
277. KEPALA BIDANG LALU LINTAS DAN STATUS PADA KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS SELURUH INDONESIA
278. KEPALA BIDANG WASDAKIM PADA KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS SELURUH INDONESIA
279. KEPALA BIDANG PENDARATAN DAN IZIN MASUK PADA KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS SELURUH INDONESIA
280. KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS I SELURUH INDONESIA
281. KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS II SELURUH INDONESIA
282. KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS III SELURUH INDONESIA
283. KEPALA BAGIAN TATA USAHA PADA RUMAH DETENSI IMIGRASI PUSAT
284. KEPALA BIDANG REGISTRASI DAN PERAWATAN PADA RUMAH DETENSI IMIGRASI PUSAT
285. KEPALA BIDANG PENEMPATAN, KEAMANAN, PEMULANGAN DAN DEPORTASI PADA RUMAH DETENSI IMIGRASI PUSAT
286. KEPALA RUMAH DETENSI IMIGRASI SELURUH INDONESIA

PEJABAT FUNGSIONAL

287. PEMERIKSA PATEN
288. PEMERIKSA MERK
289. PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS)
290. PEMERIKSA DESAIN INDUSTRI
291. BENDAHARA
292. PANITIA PENGADAAN BARANG DAN JASA.



 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
 REPUBLIK INDONESIA,

 AMIR SYAMSUDIN